
Analisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat

Regional social disparity analysis of Sekadau Regency, West Kalimantan Province

F R Hernovianty¹, N N Pratiwi¹, dan D Adventia¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura

Corresponding author's email: teta.firsa02@gmail.com

Abstrak. Ketidakmerataan proses pembangunan dapat mengakibatkan kesenjangan antar daerah. Secara administratif, Kabupaten Sekadau adalah daerah tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki masalah ketimpangan wilayah. Penyebaran penduduk yang tidak merata, cakupan wilayah yang luas dan keterbatasan infrastruktur sosial merupakan faktor penyebab ketimpangan di Kabupaten Sekadau. Perkembangan penduduk yang cenderung terkonsentrasi di pusat kabupaten menjadikan daerah pedalaman semakin tertinggal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis skoring untuk mengukur tingkat ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau dengan mempertimbangkan indikator pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, dan tenaga kerja. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau termasuk tingkat ketimpangan tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial adalah pertumbuhan penduduk dimana persentase pertumbuhan penduduk kabupaten lebih besar dibandingkan persentase pertumbuhan penduduk setiap kecamatan. Selain itu, kepadatan penduduk setiap kecamatan juga lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten dan jumlah penduduk yang bekerja di setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja.

Kata Kunci: Kabupaten Sekadau; Ketimpangan Sosial; Ketimpangan Wilayah

Abstract. Inequality in the development process can effect in disparities among regions. Administratively, Sekadau Regency is a regency level area in West Kalimantan Province which has the problem of regional inequality. The uneven distribution of the population, wide area coverage, and limited social infrastructure are the factors causing inequality in Sekadau District. Population development tends to be converged in the center of the district making the hinterland increasingly neglected. The goals of this study was to analyze regional social disparities in Sekadau Regency. This study applies a quantitative approach with scoring analysis to measure the level of regional social inequalities in Sekadau Regency by considering indicators of population growth, population density, education level, public health, and manpower. The results showed that social disparities in Sekadau Regency was classified as high inequality. The factor that influences social inequality is population growth, where the population growth rate of the regency is higher than the population growth rate of each district. In addition, the population density of each district is also lower than the population density of the regency and the number of working population in each district of Sekadau Regency is lower than the total working age population.

Keywords: Regional Disparity; Sekadau Regency; Social Disparity

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses dalam mewujudkan harapan bangsa menuju pemerataan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan juga didefinisikan sebagai tahapan skala nasional yang disertai dengan perubahan-perubahan struktural dari segi sosial, gaya hidup masyarakat, peran kelembagaan dan juga percepatan produktivitas ekonomi, penghapusan kesenjangan dan pengentasan kemiskinan [1]. Para pakar ekonomi dan pakar perencanaan wilayah mengatakan bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan yang merata merupakan dua hal yang penting dan tujuan dari proses pembangunan [2].

Kerap kali, kesenjangan pembangunan wilayah menjadi akar permasalahan dalam pembangunan antar daerah, maka secara spasial pembangunan dirasa tidak selalu sama di setiap daerah [3]. Hal ini tidak hanya dijumpai dalam alokasi penghasilan masyarakat, akan tetapi dijumpai juga pada proses pengembangan wilayah dalam suatu negara [2]. Daerah-daerah pedalaman yang masih terisolasi dan rendah tingkat pembangunannya cenderung bergantung pada daerah luar yang lebih maju [4]. Kesenjangan dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi alam dan perbedaan struktur sosial penduduk pada setiap daerah [5]. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan menghapus kesenjangan pembangunan [6].

Jika tidak diantisipasi secara dini, kesenjangan pembangunan juga dapat memicu masalah yang lebih besar seperti konflik sosial demografi, ekonomi, politik, dan lingkungan. Bahkan hal ini dapat menjadi hambatan dan tantangan skala makro yang menimbulkan kerugian dalam proses dan hasil pembangunan suatu wilayah [7]. Secara administratif, Kabupaten Sekadau

merupakan satu dari 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau pada tahun 2003. Kabupaten Sekadau masih memiliki masalah ketimpangan sosial wilayah, diantaranya adalah penyebaran penduduk yang kurang merata dan cenderung terkonsentrasi pada pusat-pusat permukiman utama. Dominasi sebaran penduduk Kabupaten Sekadau cenderung terpusat di bagian selatan dibandingkan di bagian utara. Hal ini juga dipicu dengan keberadaan sarana dan prasarana yang tidak merata antara utara dan selatan Kabupaten Sekadau. Sebaran penduduk terkonsentrasi di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Sekadau Hilir dengan ketersediaan sarana prasarana kewilayahan yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah pinggiran. Kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau tergolong rendah yaitu sebesar 33,32 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh sebaran yang tidak merata dan luas wilayah yang cukup besar serta masih didominasi dengan wilayah perdesaan dimana bergantung pada kegiatan pertanian. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk juga menyebabkan proses pengembangan wilayah Kabupaten Sekadau menjadi cukup sulit. Dengan demikian, perlu adanya kajian terkait analisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau sehingga proses pengembangan wilayah dapat ditingkatkan dan meratakan pembangunan pada setiap daerah.

2. Metode

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berasaskan pada filsafat positivisme, diaplikasikan pada penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu dengan teknik pemilihan sampel secara acak, pengumpulan data memakai variabel penelitian, teknik analisis bersifat kuantitatif/statistik dan bertujuan untuk menguji asumsi awal [8]. Teknik pengumpulan data menerapkan studi literatur, wawancara, dan kuesioner. Adapun informan penelitian terdiri dari Bupati Sekadau, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau. Metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring berdasarkan asumsi tolak ukur setiap aspek penilaian. Tahapan yang dilakukan dalam proses penskoringan dapat dilihat pada Gambar 1.

2.1. Mengolah data

Data yang telah dikumpulkan dipilah dan dimasukkan ke dalam aspek penilaian yang sudah ditentukan. Data tersebut kemudian diolah sesuai kebutuhan penilaian.

2.2. Uji validitas dan reliabilitas

Uji validitas dipakai untuk melihat keabsahan atau valid tidaknya hasil kuesioner sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinilai oleh kuesioner tersebut [9]. Reliabilitas merupakan suatu tahap penelitian kuantitatif untuk mendapatkan informasi terpercaya (*reliable*) sesuai dengan keadaan di lapangan [10]. Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian ini digunakan pada aspek kesehatan masyarakat dengan menggunakan program SPSS.

2.3. Distribusi frekuensi bergolong

Distribusi frekuensi bergolong adalah panduan pengelompokan frekuensi data dan terdapat penjelasan tahapan distribusi [11]. Menurut aturan Sturges, besarnya kelas interval dapat ditentukan dengan rumus:

$$K = 1 + (3,3) \log n$$

Dimana:

K = banyak kelas

n = jumlah pengamatan

Tabel 1. Dasar penentuan skor setiap aspek ketimpangan sosial Kabupaten Sekadau [12,13].

No.	Aspek	Data	Parameter	Tolak Ukur	Skor
1	Pertumbuhan penduduk	Jumlah penduduk 5 tahun	Ketimpangan tinggi	• LPP kecamatan < LPP kabupaten	3
			Ketimpangan sedang	• LPP kecamatan = LPP kabupaten	2
			Ketimpangan rendah	• LPP kecamatan > LPP kabupaten	1
2	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk Luas wilayah	Ketimpangan tinggi	• Kepadatan penduduk kecamatan < kepadatan penduduk kabupaten	3
			Ketimpangan sedang	• Kepadatan penduduk kecamatan = kepadatan penduduk kabupaten	2
			Ketimpangan rendah	• Kepadatan penduduk kecamatan > kepadatan penduduk kabupaten	1
3	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk menurut pendidikan	Ketimpangan tinggi	• Jumlah penduduk menurut pendidikan < Jumlah penduduk menurut usia sekolah	3
			Ketimpangan sedang	• Jumlah penduduk menurut pendidikan = Jumlah penduduk menurut usia sekolah	2
			Ketimpangan rendah	• Jumlah penduduk menurut pendidikan > Jumlah penduduk menurut usia sekolah	1
4	Kesehatan masyarakat	Hasil kuesioner	Ketimpangan tinggi	• > 40% responden menjawab a	3
			Ketimpangan sedang	• > 40% responden menjawab b	2
			Ketimpangan rendah	• > 40% responden menjawab c	1
5	Tenaga kerja	Jumlah penduduk yang bekerja	Ketimpangan tinggi	• Jumlah penduduk yang bekerja < Jumlah penduduk usia produktif	3
			Ketimpangan sedang	• Jumlah penduduk yang bekerja = Jumlah penduduk usia produktif	2
			Ketimpangan rendah	• Jumlah penduduk yang bekerja > Jumlah penduduk usia produktif	1

Pada penelitian ini jumlah pengamatan adalah 3 sehingga didapatkan hasil banyak kelas adalah $1+3,3 \log 3 = 2,57$ dan dibulatkan menjadi 3 kelas interval. Adapun panduan pemberian skor setiap aspek penilaian ketimpangan sosial dapat dilihat pada Tabel 1.

2.4. Analisis skoring

Analisis skoring adalah penentuan skor pada setiap aspek yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat ketimpangan sosial wilayah. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data sesuai variabel yang telah ditetapkan. Kemudian data yang diperoleh diberikan skor dengan ketentuan: (a) Skor 3 diberikan di wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi. (b) Skor 2 diberikan di wilayah dengan ketimpangan sedang. (c) Skor 1 diberikan di wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah. Pada aspek kesehatan masyarakat informasi diperoleh dari hasil kuesioner, maka terlebih dahulu yang dilakukan adalah memberi skor pada pilihan jawaban. Pilihan jawaban a mewakili skor 1, pilihan jawaban b mewakili skor 2 dan pilihan jawaban c mewakili skor 3. Pada tahapan ini, hasil skoring menunjukkan tingkat ketimpangan sosial setiap aspek penilaian pada 7 kecamatan serta menghasilkan gambaran tingkat ketimpangan sosial rata-rata wilayah Kabupaten Sekadau untuk setiap aspek penilaian.

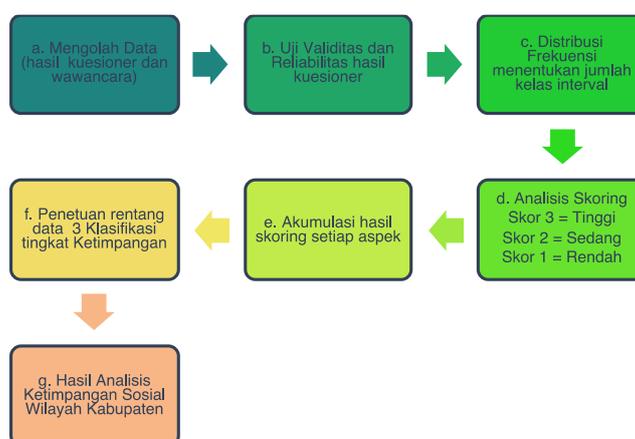
2.5. Akumulasi hasil skoring

Akumulasi hasil skoring didapatkan dari penjumlahan hasil skor setiap aspek penilaian pada masing-masing kecamatan.

2.6. Penentuan rentang data tingkat ketimpangan kabupaten

Berdasarkan hasil jumlah kelas interval sebelumnya yaitu 3 kelas interval, selanjutnya dicari rentang data dengan rumus nilai tertinggi - nilai terendah, sehingga dihasilkan rentang data yaitu $15 - 5 = 10$. Sedangkan panjang kelas (rentang) dibagi dengan banyak kelas (K) menghasilkan nilai 3,3 yang dibulatkan menjadi 3. Maka, klasifikasi yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan sosial wilayah: (a) < 9 klasifikasi tingkat ketimpangan rendah. (b) $9 - 12$ klasifikasi tingkat ketimpangan sedang. (c) > 12 klasifikasi tingkat ketimpangan tinggi.

2.7. Menarik kesimpulan hasil analisis



Gambar 1. Skema tahapan analisis.

Menyimpulkan hasil analisis yaitu tingkat ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau. Berdasarkan rentang kelas sebelumnya, didapatkan rata-rata tingkat ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau, begitu juga dengan tingkat ketimpangan sosial setiap kecamatan.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah gambaran laju perkembangan penduduk pada periode tertentu dengan mempertimbangkan angka kematian, kelahiran, imigrasi, dan emigrasi. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau berbeda-beda sehingga didapatkan pula skor yang berbeda. Membandingkan LPP kabupaten dengan LPP kecamatan adalah cara untuk melihat ketimpangan wilayah dari aspek pertumbuhan penduduk. Apabila LPP kecamatan lebih tinggi dibandingkan LPP kabupaten maka ketimpangan di kecamatan tersebut tergolong rendah dan begitu pula sebaliknya. Apabila LPP kecamatan lebih rendah dibandingkan LPP kabupaten maka tergolong ketimpangan tinggi dan apabila LPP kecamatan sama dengan LPP kabupaten maka tergolong ketimpangan sedang. Perhitungan skor pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2017	Jumlah Penduduk Tahun 2018	LPP (%)	Tolak Ukur	Skor	Tingkat Ketimpangan
Nanga Mahap	26.859	27.230	1,38	LPP kec > LPP kab	1	Ketimpangan rendah
Nanga Taman	27.446	27.609	0,59	LPP kec < LPP kab	3	Ketimpangan tinggi
Sekadau Hulu	27.174	27.246	0,26	LPP kec < LPP kab	3	Ketimpangan tinggi
Sekadau Hilir	60.839	61.885	1,72	LPP kec > LPP kab	1	Ketimpangan rendah
Belitang Hilir	22.513	22.587	0,33	LPP kec < LPP kab	3	Ketimpangan tinggi
Belitang	12.549	12.589	0,32	LPP kec < LPP kab	3	Ketimpangan tinggi
Belitang Hulu	20.303	20.430	0,63	LPP kec < LPP kab	3	Ketimpangan tinggi
Kabupaten Sekadau	199.700	201.594	0,95			
Tingkat ketimpangan aspek pertumbuhan penduduk						Ketimpangan tinggi

Berdasarkan hasil analisis, LPP tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Sekadau Hilir, yaitu sebesar 1,72% dimana LPP kecamatan lebih tinggi daripada LPP Kabupaten Sekadau sebesar 0,95%, sehingga tingkat ketimpangan Kecamatan Sekadau Hilir tergolong ketimpangan rendah. LPP

terendah dimiliki oleh Kecamatan Sekadau Hulu sebesar 0,26% dimana LPP kecamatan lebih rendah daripada LPP Kabupaten Sekadau sebesar 0,95%, sehingga tingkat ketimpangan Kecamatan Sekadau Hulu tergolong ketimpangan tinggi. Dapat dilihat bahwa secara umum tingkat ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau pada aspek pertumbuhan penduduk tergolong ketimpangan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi tingkat ketimpangan tinggi yang dimiliki oleh 5 dari 7 kecamatan atau 71% dan 2 dari 7 kecamatan atau 29% memiliki tingkat ketimpangan rendah. Faktor yang menyebabkan ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kecamatan adalah migrasi dan kelahiran/kematian penduduk yang tidak merata pada tiap kecamatan. Sebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di Kecamatan Sekadau Hilir sebagai ibukota kabupaten. Berdasarkan data BPS, perbandingan jumlah imigrasi dan kelahiran dengan jumlah emigrasi dan kematian pada kecamatan yang tergolong tingkat ketimpangan tinggi adalah 2:1. Sedangkan untuk kecamatan yang tergolong ketimpangan rendah, perbandingan antara jumlah imigrasi dan kelahiran dengan jumlah emigrasi dan kematian adalah 6:1.

3.2. Kepadatan penduduk

Terkonsentrasinya pembangunan dan kepadatan penduduk pada pusat kota disebabkan oleh tidak meratanya kepadatan penduduk suatu daerah. Hal ini yang mempengaruhi proses pembangunan hanya terjadi di pusat kota, sehingga meningkatkan kesenjangan sosial antar daerah padat penduduk dan jarang penduduk. Asumsi dasar pengukuran tingkat ketimpangan sosial untuk aspek kepadatan penduduk yaitu ketimpangan tinggi apabila kepadatan penduduk di kecamatan tersebut lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten, begitu juga sebaliknya. Ketimpangan rendah apabila kepadatan penduduk kecamatan lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Ketimpangan sedang jika angka kepadatan penduduk kecamatan sama dengan angka kepadatan penduduk kabupaten. Perhitungan skor kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 2.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sekadau adalah 37,03 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir yaitu 72,55 jiwa/km² dan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Belitang Hulu sebesar 17,57 jiwa/km². Berdasarkan hasil analisis, ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau dilihat dari kepadatan penduduk termasuk ketimpangan tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa 57% atau 4 dari 7 kecamatan di Kabupaten Sekadau memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten dan 43% atau 3 dari 7 kecamatan memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten. Luas wilayah kecamatan yang besar dan jumlah populasi yang tinggi menunjukkan tingkat kepadatan penduduk sedang. Di sisi lain, luas wilayah kecamatan yang besar dan jumlah populasi yang kecil menunjukkan tingkat kepadatan penduduk rendah. Untuk kecamatan yang memiliki luas wilayah yang kecil namun jumlah populasinya banyak maka kepadatan penduduknya tinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Nanga Mahap sebesar 586,6 km² atau 10% dan Kecamatan Belitang sebesar 281 km² atau 5% dari luas wilayah Kabupaten Sekadau. Kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di

Kabupaten Sekadau, namun menampung cukup banyak jumlah penduduk sehingga tergolong kepadatan penduduk tinggi. Selain itu, Kecamatan Belitang Hulu juga merupakan kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan sosial yang tinggi dikarenakan tingkat kepadatan penduduk kecamatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau. Hal ini mellihatkan bahwa Kecamatan Belitang Hulu memiliki luas wilayah yang terbesar diantara 6 kecamatan lainnya yaitu sebesar 1.162,7 km² atau 21% dari luas wilayah Kabupaten Sekadau

Tabel 3. Skor kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau.

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Kepadatan Penduduk	Tolak Ukur	Skor	Tingkat Ketimpangan
Nanga Mahap	568,6	27.230	47,89	Kepadatan penduduk kec > kepadatan penduduk kab	1	Ketimpangan rendah
Nanga Taman	945,0	27.609	29,22	Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab	3	Ketimpangan tinggi
Sekadau Hulu	869,7	27.246	31,33	Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab	3	Ketimpangan tinggi
Sekadau Hilir	853,0	61.885	72,55	Kepadatan penduduk kec > kepadatan penduduk kab	1	Ketimpangan rendah
Belitang Hilir	764,3	22.587	29,55	Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab	3	Ketimpangan tinggi
Belitang	281,0	12.589	44,80	Kepadatan penduduk kec > kepadatan penduduk kab	1	Ketimpangan rendah
Belitang Hulu	1.162,7	20.430	17,57	Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab	3	Ketimpangan tinggi
Kabupaten Sekadau	5.444,3	201.594	37,03			
Tingkat ketimpangan sosial aspek kepadatan penduduk						Ketimpangan tinggi

3.3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan terdiri dari beberapa kategori, yaitu SD dengan rentang usia 7-12 tahun, SMP dengan rentang usia 13-15 tahun, SMA dengan rentang usia 16-18 tahun dan perguruan tinggi dengan rentang usia 19-45 tahun. Membandingkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk menurut usia sekolah (lihat Tabel 4) merupakan cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat skor ketimpangan sosial wilayah menurut aspek tingkat pendidikan. Ketimpangan tinggi terjadi apabila jumlah penduduk usia sekolah lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. Ketimpangan sedang terjadi apabila jumlah penduduk menurut usia sekolah sama dengan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. Ketimpangan rendah terjadi apabila jumlah penduduk menurut usia sekolah lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. Perhitungan skor tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Perbandingan tingkat pendidikan dengan usia sekolah Kabupaten Sekadau.

Perbandingan	Nanga Mahap	Nanga Taman	Sekadau Hulu	Sekadau Hilir	Belitang Hilir	Belitang	Belitang Hulu	Kabupaten Sekadau
SD (a)	7.019	5.625	4.292	8.493	4.594	2.21	2.831	35.064
7-12 tahun (b)	2.995	2.99	3.47	7.887	2.503	1.595	2.341	23.781
a / b	a > b	a > b	a > b	a > b	a > b	a > b	a > b	a > b
SMP (c)	15.607	15.035	13.646	29.48	12.389	5.981	9.253	101.391
13-15 tahun (d)	1.557	1.542	1.829	3.416	1.253	724	1.245	11.566
c / d	c > d	c > d	c > d	c > d	c > d	c > d	c > d	c > d
SMA (e)	1.783	2.289	3.713	10.09	2.429	2.141	2.817	25.262
16-18 tahun (f)	1.754	1.63	1.835	3.647	1.473	770	1.179	12.288
e / f	e > f	e > f	e > f	e > f	e > f	e > f	e > f	e > f
Perguruan Tinggi (g)	317	511	674	3.114	525	489	674	6.304
19-45 tahun (h)	12.516	13.184	13.166	30.317	10.992	6.344	9.796	96.315
g / h	g < h	g < h	g < h	g < h	g < h	g < h	g < h	g < h

Tabel 5. Skor tingkat pendidikan Kabupaten Sekadau.

Kecamatan	Skor				Rata-Rata	Tingkat Ketimpangan Aspek Tingkat Pendidikan
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi		
Nanga Mahap	1	1	1	3	2	Ketimpangan Sedang
Nanga Taman	1	1	1	3	2	
Sekadau Hulu	1	1	1	3	2	
Sekadau Hilir	1	1	1	3	2	
Belitang Hilir	1	1	1	3	2	
Belitang	1	1	1	3	2	
Belitang Hulu	1	1	1	3	2	

Setelah menentukan skor, didapatkan hasil bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Sekadau berdasarkan tingkat pendidikan termasuk ketimpangan sedang. Untuk tingkat pendidikan SD,

SMP, dan SMA jumlah penduduk yang bersekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah di setiap kecamatan. Artinya, ketimpangan sosial wilayah menurut aspek tingkat pendidikan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA termasuk ketimpangan rendah. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang tamat pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia tingkat pendidikan tinggi sehingga tergolong ketimpangan tinggi. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi sehingga keinginan untuk menempuh perguruan tinggi sangat minim. Penduduk merasa hanya dengan menempuh pendidikan menengah, maka penduduk sudah dapat mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kemampuan keuangan keluarga untuk menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi yang kurang juga merupakan salah satu penyebab kurangnya penduduk yang menempuh pendidikan tinggi.

3.4. Kesehatan masyarakat

Kesehatan masyarakat berpengaruh dalam pembangunan suatu wilayah. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan membuat masyarakat bekerja secara efektif dan efisien sehingga mendapatkan nilai tambah dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Informasi terkait kesehatan masyarakat di Kabupaten Sekadau dilihat dengan membagikan kuesioner kepada 98 responden yang tersebar di setiap kecamatan. Adapun faktor yang diteliti antara lain frekuensi terserang penyakit, jenis penyakit, pengaruh penyakit terhadap pekerjaan masyarakat, keinginan untuk berobat, tempat untuk berobat, kelengkapan alat kesehatan, pelayanan dari petugas kesehatan, serta jarak tempuh untuk menuju tempat berobat (lihat Tabel 6). Mengukur besar ketimpangan berdasarkan kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara mengakumulasi jawaban responden. Skor 1 diberikan apabila > 40% jawaban responden pada pilihan jawaban A, skor 2 diberikan jika > 40% jawaban responden pada pilihan jawaban B dan skor 3 diberikan jika > 40% jawaban responden pada pilihan jawaban C.

Tabel 6. Daftar pertanyaan kesehatan masyarakat.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban		
		A	B	C
1	Frekuensi terserang penyakit	Tidak pernah	1-5 kali	> 5 kali
2	Jenis penyakit	Tidak ada	Salah satu	Menular & tidak menular
3	Pengaruh penyakit terhadap pekerjaan masyarakat	Tidak mengganggu	Terkadang	Sangat mengganggu
4	Keinginan untuk berobat	Selalu	Jarang	Tidak pernah
5	Tempat untuk berobat	Puskesmas/rumah sakit/praktek dokter	Mantri/dukun	Tidak ada
6	Kelengkapan alat kesehatan	Baik	Cukup	Buruk
7	Pelayanan dari petugas kesehatan	Baik	Cukup	Buruk
8	Jarak tempuh untuk menuju tempat berobat	< 2 km	2-5 km	> 5 km

Setelah menyesuaikan jawaban responden dengan skor yang telah ditentukan dan merata-ratakan hasil skor dari kesehatan masyarakat, didapatkan hasil bahwa ketimpangan wilayah di Kabupaten Sekadau berdasarkan aspek kesehatan masyarakat tergolong ketimpangan sedang (lihat Tabel 7). Hal ini terlihat dari 8 pertanyaan yang diberikan kepada responden, rata-rata jawaban yang diperoleh berada pada kategori ketimpangan sedang.

Tabel 7. Skor kesehatan masyarakat Kabupaten Sekadau.

Kecamatan	% Jawaban Responden	Skor	Tingkat Ketimpangan Aspek Kesehatan Masyarakat
Nanga Mahap	46,6% responden memilih jawaban B	2	Ketimpangan sedang
Nanga Taman	53,5% responden memilih jawaban B	2	
Sekadau Hulu	51,8% responden memilih jawaban B	2	
Sekadau Hilir	61,6% responden memilih jawaban B	2	
Belitang Hilir	64,2% responden memilih jawaban B	2	
Belitang	61,6% responden memilih jawaban B	2	
Belitang Hulu	58% responden memilih jawaban B	2	

3.5. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah faktor yang berpengaruh dalam pembangunan wilayah. Semakin banyak penduduk yang bekerja maka dapat mempercepat pembangunan suatu wilayah. Ketimpangan wilayah dari aspek tenaga kerja dapat dilihat dengan membandingkan jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penduduk usia kerja. Ketimpangan tinggi terjadi apabila jumlah penduduk yang bekerja kurang dari jumlah penduduk usia kerja. Ketimpangan sedang terjadi jika jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah penduduk usia rendah dan ketimpangan rendah jika jumlah penduduk yang bekerja lebih dari jumlah penduduk usia kerja. Perhitungan skor tenaga kerja penduduk Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 8.

Berdasarkan hasil analisis, jumlah penduduk yang bekerja di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Sehingga, hasil skor yang didapatkan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan sosial menurut aspek tenaga kerja setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau tergolong tinggi. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja adalah 2:1.

Tabel 8. Hasil skor tenaga kerja.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Bekerja (a)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (b)	a / b	Skor	Tingkat Ketimpangan Aspek Tenaga Kerja
Nanga Mahap	12.531	19.612	a < b	3	Ketimpangan Tinggi
Nanga Taman	14.148	20.301	a < b	3	
Sekadau Hulu	14.073	20.773	a < b	3	
Sekadau Hilir	26.654	46.805	a < b	3	
Belitang Hilir	10.355	15.238	a < b	3	
Belitang	5.314	9.939	a < b	3	
Belitang Hulu	10.240	15.029	a < b	3	
Kabupaten Sekadau	93.315	147.697	a < b	3	

3.6. Rata-rata tingkat ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau

Setelah mendapatkan hasil skoring ketimpangan sosial setiap aspek penilaian pada 7 kecamatan, selanjutnya dilakukan akumulasi hasil skor untuk melihat nilai rata-rata tingkat ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau. Adapun untuk menentukan rentang data menggunakan rumus interval dengan 3 kelas. Nilai tertinggi dan nilai terendah didapatkan dari total skor terbesar dan terkecil untuk setiap indikator penilaian ketimpangan sosial, yaitu pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat dan tenaga kerja. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut.

$$I = \frac{\text{Range}}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

Range = Nilai tertinggi – Nilai terendah

K = Kelas

$$I = \frac{15 - 5}{3} = 3,3$$

Maka interval kelas yang diterapkan untuk mengukur tingkat ketimpangan sosial wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau, antara lain:

< 9 : Ketimpangan rendah

9 – 12 : Ketimpangan sedang

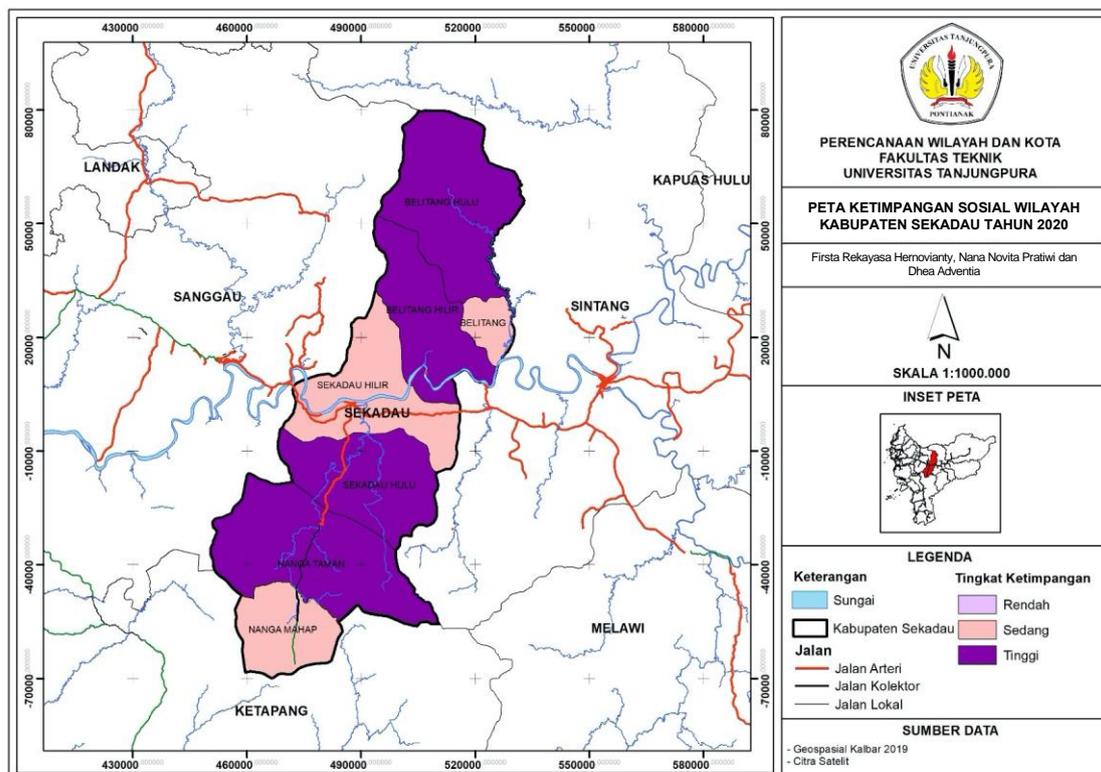
> 12 : Ketimpangan tinggi

Berdasarkan Tabel 9 didapatkan hasil bahwa tingkat ketimpangan wilayah Kabupaten Sekadau dilihat dari keadaan sosial termasuk ketimpangan tinggi. Kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan sedang adalah Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hilir, dan Belitang. Kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi adalah Kecamatan Nanga Taman, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang Hulu. Peta ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau dapat ditinjau pada Gambar 2. Adapun aspek penilaian yang menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan sosial di Kabupaten Sekadau adalah pertumbuhan penduduk, kepadatan

penduduk, dan tenaga kerja. Dengan demikian, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan sosial di Kabupaten Sekadau. Hal ini dapat didukung dengan memperkuat kualitas sarana pendidikan dan sarana kesehatan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Sekadau.

Tabel 9. Ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau.

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk	Tingkat Pendidikan	Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kerja	Total	Tingkat Ketimpangan Sosial
Nanga Mahap	1	1	2	2	3	9	Ketimpangan sedang
Nanga Taman	3	3	2	2	3	13	Ketimpangan tinggi
Sekadau Hulu	3	3	2	2	3	13	Ketimpangan tinggi
Sekadau Hilir	1	1	2	2	3	9	Ketimpangan sedang
Belitang Hilir	3	3	2	2	3	13	Ketimpangan tinggi
Belitang	3	1	2	2	3	11	Ketimpangan sedang
Belitang Hulu	3	3	2	2	3	13	Ketimpangan tinggi



Gambar 2. Peta ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau.

4. Kesimpulan

Ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau adalah ketimpangan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial tergolong tinggi adalah pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk di tiap kecamatan rata-rata lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau. Kepadatan penduduk pada beberapa kecamatan lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk di Kabupaten Sekadau. Jumlah penduduk yang bekerja di seluruh kecamatan lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk usia kerja. Hal ini yang menyebabkan tingginya ketimpangan sosial di wilayah Kabupaten Sekadau. Adapun kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan sosial sedang adalah Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hilir, dan Belitang. Sedangkan kecamatan yang tergolong ketimpangan tinggi adalah Kecamatan Nanga Taman, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang Hulu.

Referensi

- [1] Todaro MP. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga; 2000.
- [2] Sirojuzilam. Regional Planning and Development (Kasus Medan). J Perenc Pengemb Wil Wahana Hijau 2005;1:10–4.
- [3] Ika Wahyuntari L, Pujiati A. Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Econ Dev Anal J 2018;5:296–305. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22153>.
- [4] Adisasmita R. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Yogyakarta. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2011.
- [5] Simbolon TR. Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera. Semin. Nas. Multidisiplin Ilmu 2017, Asahan: Center for Open Science; 2017. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xzmr9>.
- [6] Rosmeli. Dampak Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Provinsi Jambi. J Sains Sosio Hum 2018;2:79–84. <https://doi.org/10.22437/jssh.v2i1.5284>.
- [7] Mopangga H. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Trikonomika 2011;10:40–51.
- [8] Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta; 2017.
- [9] Ghozali I. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2006.
- [10] Sitinjak TJR, Sugiarto. Lisrel. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2006.
- [11] Mundir. Statistik Pendidikan: Pengantar Analisis Data Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jember: STAIN Jember Press; 2012.
- [12] Tambunan TTH. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia; 2003.
- [13] Todaro MP, Smith SC. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga; 2006.